



# SUBSTANSI RANCANGAN AWAL RPJMD KOTA MALANG TAHUN 2018-2023

Osi Ji



# Visi

ALP



KOTA MALANG

**BERMARTABAT**



**BALDATUN THOYIBATUN  
WA ROBBUN GHOFUR**

TERCIPTA SITUASI, KONDISI, TATANAN DAN  
KARAKTER YANG MULIA BAGI KOTA MALANG  
BESERTA SEGENAP MASYARAKATNYA

# RPJMD KOTA MALANG TAHUN 2018-2023



## KOTA MALANG BERMARTABAT

### MISI 1

MENJAMIN AKSES DAN KUALITAS PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN LAYANAN DASAR LAINNYA BAGI SEMUA WARGA

### MISI 2

MEWUJUDKAN KOTA PRODUKTIF DAN BERDAYA SAING BERBASIS EKONOMI KREATIF, KEBERLANJUTAN DAN KETERPADUAN

### MISI 3

MEWUJUDKAN KOTA YANG RUKUN DAN TOLERAN BERAZASKAN KEBERAGAMAN DAN KEBERPIHAKAN TERHADAP MASYARAKAT RENTAN DAN GENDER

### MISI 4

MEMASTIKAN KEPUASAN MASYARAKAT ATAS LAYANAN PEMERINTAH YANG TERTIB HUKUM, PROFESIONAL DAN AKUNTABEL



# MISI

## 1 SDM

Menjamin Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Layanan Dasar Lainnya Bagi Semua Warga

## 2 EKONOMI

Mewujudkan Kota Produktif dan Berdaya Saing berbasis Ekonomi Kreatif, Keberlanjutan dan Keterpaduan

## 3 SOSIAL

Mewujudkan Kota Yang Rukun dan Toleran berasaskan Keberagaman Dan Keberpihakan terhadap Masyarakat Rentan dan Gender

## 4 PEMERINTAHAN

Memastikan Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah yang Tertib, Hukum, Profesional, dan Akuntabel



# THE FUTURE OF MALANG

Terdapat 6 konsep yang dibangun dari ikhtiar pemahaman terhadap karakter dan potensi kota dan selanjutnya ingin diwujudkan menjadi 'wajah' Kota Malang di masa mendatang melalui pencaanangan visi pembangunan kota sebagai berikut :

## Malang City Heritage

*"Icon Sejarah dan Jejak Perjuangan"*



## Malang Creative

*"Centre of Creative Economic"*



## Malang Services

*"Role models Pemerintahan colaborative"*



## Malang 4.0

*"Literasi Teknologi Informasi di segala Bidang"*



## Malang Halal

*"Centre of Halal Tourisme"*



## Malang Nyaman

*"tata kota yang ramah dan berkelanjutan"*



## THE FUTURE OF MALANG



### 01

#### Penegakan Regulasi Cagar Budaya

Implementasi Perda 1/2018 tentang Cagar Budaya untuk meningkatkan perlindungan keberadaan cagar budaya (tangible dan intangible) serta menjadi payung hukum upaya pelestariannya

### 02

#### Pengembangan Destinasi dan Paket Wisata Heritage

Kayutangan "Malioboro-nya Malang", Sentra Batik, Pecinan, Kauman, Museum, Ijen Boulevard, Alun-Alun, dll

### 03

#### Pemberdayaan Masyarakat

Membangun rasa memiliki cagar budaya melibatkan masyarakat dan berbagai komunitas sejak perencanaan sampai pengawasan. Media massa sebagai mitra membangun public awareness

### 04

#### Penguatan Peran Perguruan Tinggi, Komunitas, Media dan Pelaku Bisnis

Mendorong lahirnya terobosan-terobosan inovatif dalam setiap aspek pelestarian sejarah dan budaya kota

### 05

#### Penguatan Edukasi Sejarah dan Budaya di Setiap Jenjang Sekolah

Menanamkan pengetahuan kepada generasi muda akan kekayaan sejarah dan budaya kota

Semenjak tahun 2015, komitmen dan fasilitasi pengembangan ekonomi kreatif di Kota Malang mengalami akselerasi yang signifikan.

Pembentukan kelembagaan, penyelenggaraan berbagai event, termasuk menjadi Tuan Rumah ICCC kedua, hingga penetapan Roadmap Ekonomi Kreatif 2018-2022 menjadi Peraturan Walikota

adalah modal membangun sektor ekonomi kreatif sebagai salah satu katalis pertumbuhan ekonomi bersama sektor pariwisata

**2016**

- Komite ekonomi kreatif
- Malang Creative Fusion
- Indonesia Creative Cities Conference 2<sup>nd</sup>
- Festival Malang Mbois 1<sup>st</sup>

**2017**

- Uji Petik Subsektor Prioritas dan Unggulan
- Festival Malang Mbois 2<sup>nd</sup>
- Maskot Kota Malang

**2015 START**

**MALANG CREATIVE**

**2018**

Perwal 12/2018 (Roadmap Ekraf 2018-2022)

Festival Malang Mbois 3<sup>rd</sup>

**Subsektor Prioritas Dan Unggulan Kota**

**Prioritas :**  
*Game dan Aplikasi*

**Unggulan :**  
*Kuliner  
Film, Video & Animasi*

**NEXT....**

- Penetapan Ekraf sebagai salah satu Sasaran Strategis RPJMD
- Co-Working Space di 5 Kecamatan
- Mall UMKM

Substansi Kebijakan  
**Roadmap Pengembangan Ekonomi Kreatif 2018-2022**  
Perwal 12/2018



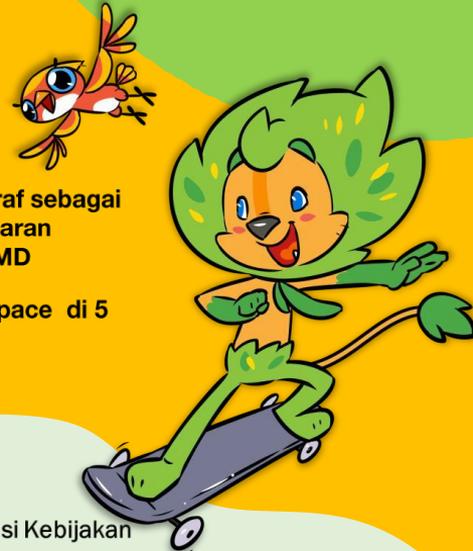
Penyediaan Infrastruktur



Pengembangan Ekosistem



Peningkatan Pemasaran

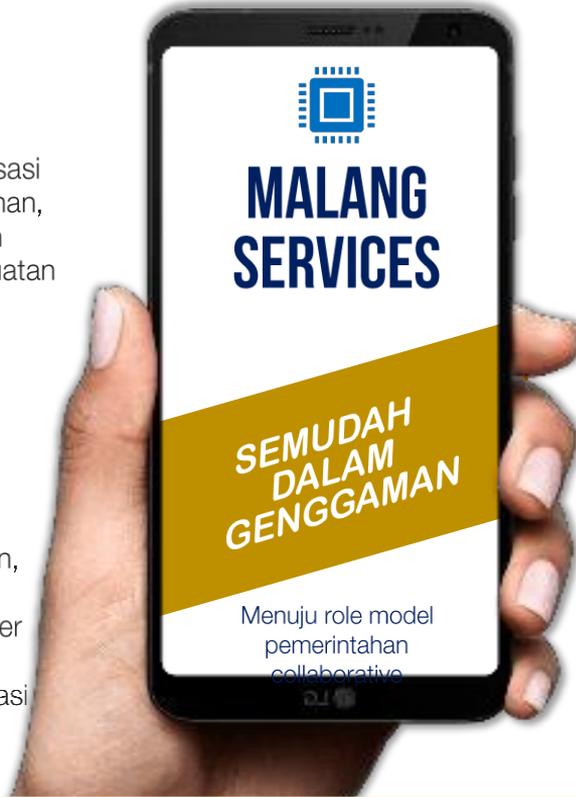


## 01 Penegakan Perda dan Tertib Hukum

Penyelesaian sengketa hukum, Harmonisasi properda dengan kebutuhan pembangunan, penguatan koordinasi untuk penanganan permasalahan lintas kewenangan, penguatan monev, pengendalian dan penertiban pelaksanaan Perda, sistem pengaduan

## 02 Membangun Sistem Kelembagaan Efektif

Penataan struktur kelembagaan, penyempurnaan sistem perencanaan, anggaran, dan evaluasi pembangunan, Penguatan sistem layanan publik, optimalisasi sumber pendapatan daerah, penataan aset, transparansi keuangan, mendorong inovasi



## 03 Mendorong Meritokrasi Manajemen ASN

Mekanisme reward and punishment berbasis kinerja, membangun mental aparatur berintegritas dan berjiwa melayani, Pengembangan Karir ASN secara Profesional, Membangun Standar Kompetensi, Sistem Talent Pool untuk kebutuhan jabatan

## 04 Percepatan Integrasi Teknologi Informasi

Sistem respon cepat, Pemanfaatan Big Data dan Geo Spasial, Optimalisasi Ngalam Command Center, Pembentukan Tim Koordinasi Daerah untuk SPBE, Penguatan SOP seluruh Aplikasi berbasis IT, Kerjasama Aplikasi Berbagi Pakai, Kemitraan dengan Perguruan Tinggi

### FAKTA PENUNJANG



Kota Malang telah menyiapkan Roadmap Smart City 2019-2023 untuk diselaraskan dengan konsepsi malang services



Rating Akuntabilitas Kinerja Kota Kota Malang berdasarkan evaluasi Kementerian PAN RB pada tahun 2017 adalah BB.



Pemkot telah menetapkan SK Walikota 203/2018 tentang Tim Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik



Kota Malang telah mengembangkan lebih dari 60 aplikasi untuk fungsi administrasi pemerintahan maupun layanan publik.

# MALANG 4.0

Malang berkomitmen mengoptimalkan karakteristik uniknya sebagai Kota Pendidikan untuk menjawab tantangan penguasaan teknologi informasi, efisiensi bisnis, Internet of Things, dan Rekayasa Robotika yang menjadi karakteristik era Revolusi Industri 4.0.

## MELEK TEKNOLOGI KUAT KARAKTER INGAT BUDAYA

Selain menguasai teknologi, Kota Malang juga ingin menghasilkan generasi yang kuat karakternya dan tak lupa pada budaya dan kearifan lokal.

## HAPUS CALISTUNG DI USIA EMAS ANAK-ANAK

## PERKUAT PENDIDIKAN KARAKTER

## SEKOLAH IBU/PARENTING

## GERAKAN SHALAT BERJAMAAH



## Mendorong Entrepreneurship dan Pengembangan IKM

## Reorientasi Pendidikan dan Peningkatan Kapasitas Berdasarkan Skill dan Kompetensi era Industri 4.0

## Menyuburkan Ekosistem Inovasi dan Teknologi

## Meningkatkan kemudahan berusaha dan berinvestasi

## Menyiapkan infrastruktur digital

# Malang Halal

**Pengembangan destinasi wisata halal**

**Event Wisata Halal**

**Kerjasama Pencapaian Standar Hotel Halal**

**Destinasi Kuliner Halal**

**Penguatan Kapasitas SDM Pariwisata Halal**

**Promosi Paket Wisata Halal**



# MALANG NYAMAN



## PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Penertiban, Arah Kebijakan Pusat Pertumbuhan baru, Kerjasama tata ruang perbatasan daerah



## PENGELOLAAN TRANSPORTASI MODERN

Jalan Lingkar, Rekayasa Lalu Lintas, ATCS, Penataan Parkir, Revitalisasi Angkutan Umum/Pengembangan Transportasi Massal



## REVITALISASI SISTEM DRAINASE

Eco-Drainage, Sistem Informasi Drainase, Pembangunan Drainase Terintegrasi



## PENGELOLAAN KAWASAN PERMUKIMAN DAS DAN KUMUH

Peremajaan, Pengembangan Rusunawa, Pengurangan Rumah Tidak Layak Huni, Koordinasi Implementasi Kewenangan DAS Sungai Strategis Nasional, Pemberdayaan Masyarakat, Penguatan Kapasitas Ketangguhan Kebencanaan



## PENYEDIAAN SARPRAS KOTA YANG NYAMAN

Pedestrian, Jalur Sepeda, Penerangan Jalan, Kualitas Perkerasan Jalan, Sarana Sosial Ekonomi, dan lain-lain



## PENGELOLAAN AIR MINUM, SAMPAH DAN LIMBAH

Modernisasi TPA, Pengurangan Sampah Plastik, Perluasan Manfaat Bank Sampah Malang, Pengelolaan Limbah B3, Pengamanan Air Baku, Pemenuhan Target Cakupan 100% Air Minum dan Akses Sanitasi Layak



## PEMENUHAN KEBUTUHAN RTH PUBLIK

Taman Ramah Anak, Taman Ramah Lansia, dan Hutan Kota tersebar merata dan semakin memenuhi target 20% RTH Publik



## Prioritas MISI 1

### Sumber:

# Janji Politik

# Buku Sedekah Kebijakan Walikota

# Pidato Visi-Misi Paripurna DPRD

### PRIORITAS PENDIDIKAN:

1. Pendidikan Karakter sejak Usia Dini;
2. GRAB → Gratis Belajar 12 tahun bagi siswa tidak mampu;
3. Beasiswa Perguruan Tinggi untuk Pelajar (Warga Malang) yang berprestasi;
4. Kualitas tenaga pendidik unggul dengan Uji Kompetensi Guru >75;
5. Kualitas dan Kesejahteraan Guru (Tunjangan Guru, Kepsek, dan tenaga pendidik berbasis kinerja);
6. Rotasi Guru dan Kepsek dalam rangka pemerataan kualitas Pendidikan;
7. Upgrade Sarana Pendidikan;

### PRIORITAS KESEHATAN:

1. Universal Health Coverage (UHG) - 100% Warga Kota Malang mendapat BPJS, warga tidak mampu ditanggung Pemkot;
2. Upgrade Kualitas Layanan Puskesmas;
3. Unit Layanan Kesehatan 24 Jam, lengkap dengan dokter jaga dan perawat di setiap kelurahan;
4. JAMPERSAL 1 Juta Rupiah;
5. Ambulan Gratis tiap Kelurahan, penambahan 100 armada dengan waktu tunggu 15 menit;
6. Prefentif dan Promotif Kesehatan masyarakat dan kualitas hidup pasien terminal melalui peran aktif dokter keluarga;

### PRIORITAS LAYANAN DASAR LAINNYA:

1. Menjaga stabilitas harga bahan pokok melalui operasi pasar;
2. Menjamin ketersediaan dan diversifikasi pangan;
3. Kemudahan akses perumahan bagi warga kelas menengah;
4. Subsidi bahan pangan bagi warga miskin desil 1 dengan target konsumsi daging 1,5 kg/bulan/anak;
5. Keberpihakan belanja ASN kepada pasar tradisional;



# Prioritas MISI 2

Mewujudkan Kota Produktif dan Berdaya Saing berbasis Ekonomi Kreatif, Keberlanjutan dan Keterpaduan

## **PRIORITAS EKONOMI:**

1. Centra UMKM dan Ekonomi Kreatif (pemanfaatan ex-Ramayana dan ex-PDAM);
2. Revitalisasi pasar tradisional dan pasar modern berbasis pasar rakyat;
3. Memperbaiki sistem kelembagaan BUMD (finansial, pengawasan);
4. Menciptakan ekosistem kolaborasi dan kewirausahaan baru serta Penyediaan *co-working space* di 5 kecamatan;
5. Wisata Kreatif dan Wisata Halal: Wisata Heritage, Kampung Arema, Studio Trans, Museum al'Quran, Mall UMKM;

## **PRIORITAS TATA RUANG:**

1. Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru;
2. Membentuk fungsi polisi tata ruang;
3. Pengembangan pola ruang perbatasan antar wilayah;
4. Penyederhanaan dan Perbaikan mekanisme perijinan;

## **PRIORITAS INFRASTRUKTUR DAN SARPRAS:**

1. Jalan lingkar luar Kota Malang;
2. Pengembangan sekitar Pintu Tol;
3. Kerjasama Malang Raya pengelolaan Sungai, dan Air Minum;
4. Percepatan rekayasa lalu lintas penanggulangan macet (Zero Macet);
5. Revitalisasi sistem drainasi untuk mengurangi banjir (Zero Banjir);
6. Sarana dan prasarana Kota yang ramah dan nyaman (Trotoar, Taman dan Jembatan);
7. Pengelolaan Kawasan pemukiman Daerah Aliran Sungai (Bedah Kampung-rumah, jalan, gang, saluran air, dll);
8. Integrasi sistem Angkutan Dalam Kota Malang;

## **PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP:**

1. Pengelolaan dan Pemanfaatan sampah terpadu (zero waste) ;
2. Integrasi PAM dan PAL atas kebutuhan air dan pengelolaan limbah;
3. Pengelolaan IPAL di bangunan pemerintah, swasta dan rumah tangga berbasis komunal;
4. Pengelolaan polusi karbon kendaraan bermotor (zero carbon)

Sumber:

# Janji Politik

# Buku Sedekah Kebijakan Walikota

# Pidato Visi-Misi Paripurna DPRD



# Prioritas MISI 3

Mewujudkan Kota Yang Rukun dan Toleran berasaskan Keberagaman Dan Keberpihakan terhadap Masyarakat Rentan dan Gender

## Sumber:

- # Janji Politik
- # Buku Sedekah Kebijakan Walikota
- # Pidato Visi-Misi Paripurna DPRD

## PRIORITAS PERLINDUNGAN SOSIAL:

1. Membangun Sarana Prasarana Sosial yang ramah terhadap penyandang difabel;
2. Pembangunan panti jompo terpadu berkonsep villa lansia di wilayah malang timur;
3. Membangun sistem distribusi bantuan social darurat;
4. Membangun sistem informasi penghubung warga yang ingin membantu anak kurang mampu dan berkebutuhan khusus;
5. Membina dan Memberdayakan PMKS untuk lebih produktif;
6. Penertiban peredaran minuman berakohol dan tempat hiburan;

## PRIORITAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK:

1. RTH ramah perempuan dan anak;
2. Membangun sistem informasi pelaporan, pelacakan dan penindakan kasus kekerasan perempuan dan akan;
3. Penyiapan keluarga muda baru dengan konsep sekolah ibu;

## PRIORITAS LINGKUNGAN DAN BUDAYA:

1. Pengembangan sistem pengamanan lingkungan dengan e-siskamling;
2. Membangun event-event kebudayaan yang mendidik sebagai salah satu destinasi wisata;
3. Penguatan forum dan peran tokoh-tokoh agama dan masyarakat;

## PRIORITAS PEMBERDAYAAN MASYARAKT DAN KOMUNITAS:

1. Menyusun kalender event-event pemberdayaan komunitas sebagai destinasi edukasi dan wisata;
2. Pengembangan Kawasan pemberdayaan tematik;

# Prioritas MISI 4

Memastikan Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel

## **PRIORITAS HUKUM:**

1. Penyesaian sengketa hukum;
2. Harmonisasi Properda dengan Kebutuhan Pembangunan;
3. Sistem Pengaduan Pelanggaran Hukum

## **PRIORITAS KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN:**

1. Struktur kelembagaan yang ramping dan tepat fungsi;
2. Penyempurnaan sistem perencanaan, penganggaran dan evaluasi pembangunan;
3. Pengembangan sistem layanan public yang cepat, mudah dan terintegrasi;
4. Penertiban pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
5. Pengelolaan sistem manajemen Aset untuk produktifitas;
6. Pengelolaan sistem keuangan yang bebas KKN dan Transparan;
7. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah;

## **PRIORITAS MANAJEMEN APARATUR:**

1. Mengembangkan sistem reward dan punishment kinerja aparatur;
2. Membangun standar kompetensi dan dan peta kebutuhan kepegawaian secara professional;
3. Menjalankan talent poll untuk menyediakan kebutuhan jabatan structural yang professional;
4. Membangun budaya kerja yang berintegritas dan jiwa kepemimpinan yang tangguh;

## **PRIORITAS TEKNOLOGI INFORMASI:**

1. Membangun sistem respon cepat dan monitoring pembangunan;
2. Membangun Big Data dan Pola pemanfaatan secara Geo Spasial;
3. Mengintegrasikan sistem informasi manajemen pemerintahan yang terintegrasi;

Sumber:

- # Janji Polifik
- # Buku Sedekah Kebijakan Walikota
- # Pidato Visi-Misi Paripurna DPRD

## Suprastruktur Kelembagaan



### Program:

1. Penegakan Perundang-Undangan Daerah
2. Penerapan dan Penegakan Hukum
3. Anggaran dan Perbendaharaan Daerah
4. Pemanfaatan Aset Daerah
5. Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah
6. Pengembangan Potensi Pajak Daerah
7. Evaluasi dan Reviu Penyelenggaraan Pemerintahan
8. Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas Kinerja
9. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
10. Pelayanan Pencatatan Sipil
11. Layanan Pengadaan Barang/Jasa
12. Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumberdaya Alam
13. perencanaan pembangunan manusia, masyarakat, sosial dan budaya
14. perencanaan pembangunan infrastruktur, dan pengembangan wilayah

### Strategi:

- ✓ Meningkatkan Penegakan Perda dan Peraturan bersanksi hukum;
- ✓ Peningkatan layanan publik melalui penataan kelembagaan dalam mewujudkan pelayanan publik efektif, efisien dan proporsional;
- ✓ Meningkatkan sistem penempatan pegawai sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerjanya;
- ✓ Pengembangan Big Data Informasi yang terintegrasi.

15. Penyelenggaraan Pelayanan Non Perizinan
16. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
17. Pengadaan dan Mutasi Kepegawaian
18. Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara
19. Pengembangan Standar Kompetensi
20. Pengelolaan Aplikasi Informatika
21. Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik

## Menjaga Daya Beli Dan Perlindungan Sosial



### Strategi:

- ✓ Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang merata didukung dengan sarana dan prasarana sesuai standar;
- ✓ Peningkatan layanan kesehatan tingkat dasar dan pemerataan tenaga kesehatan;
- ✓ Optimalisasi daya beli masyarakat terhadap komoditas pangan dan non pangan;
- ✓ Optimalisasi pendampingan pembinaan serta pemberdayaan PMKS secara berkelanjutan.

### Program:

1. Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal
2. Pendidikan Sekolah Dasar
3. Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
4. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
5. Peningkatan Pelayanan Kesehatan
6. Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
7. Peningkatan Kesehatan Masyarakat
8. Peningkatan SDM, Kefarmasian dan Alat Kesehatan
9. Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah
10. Peningkatan Ketahanan Pangan
11. Pengembangan Penganekaragaman, Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan
12. Stabilitas harga dan Perlindungan Konsumen
13. Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial
14. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
15. Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial
16. Peningkatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

## Infrastruktur Perekonomian Dan Sarana Prasarana Sosial



### Strategi:

**Penerapan konservasi energi, pengelolaan persampahan dan pengembangan pola tata ruang serta peningkatan kualitas lingkungan hidup**

### Program Pembangunan

1. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Jalan, Jembatan dan Pedestrian
2. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Air dan Drainase
3. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Kota Malang
4. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Gedung/Bangunan Kantor dan Fasilitas Umum
5. Peningkatan Pelayanan Angkutan dan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
6. Pengendalian Penyelenggaraan Perpajakan
7. Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik



# Pemantapan Industri Kreatif Masyarakat



Program Pembangunan:

1. Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif
2. Pengembangan Destinasi dan Sumber Daya Pariwisata
3. Pengembangan Kinerja Pelayanan Pasar
4. Bina Perdagangan
5. pengembangan usaha mikro
6. Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
7. Peningkatan Kesempatan Kerja

Strategi:

**Optimalisasi Perekonomian Melalui Pengembangan Sektor Ekonomi Kreatif, Pengembangan Pengelolaan Pasar, Pariwisata Dan UMKM**



# Kemandirian Sosial Ekonomi



## Program Pembangunan:

1. Penataan dan Peningkatan Ketaatan Lingkungan Hidup
2. Pengelolaan Persampahan
3. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Tata Ruang
4. Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kota Malang
5. Pengendalian dan Pengawasan Perumahan dan Permukiman
6. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
7. Pemberdayaan Masyarakat
8. Pemberdayaan Perempuan
9. Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak
10. Peningkatan Kapasitas Satuan Linmas
11. Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
12. Kewaspadaan Daerah

## Strategi:

- ✓ Peningkatan kualitas infrastruktur, sarana dan prasarana perkotaan dengan menjamin kualitas transportasi, perumahan dan pemukiman serta ruang terbuka;
- ✓ Menciptakan kondisi sosial yang aman dan nyaman untuk perempuan dan anak;
- ✓ Meningkatkan partisipasi masyarakat dan stabilitas lingkungan.



# MISI 1

Menjamin Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Layanan Dasar bagi Semua Warga

Tujuan :

Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan layanan dasar lainnya

Indikator

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter

Indikator :  
Indeks Pendidikan

DINAS  
PENDIDIKAN

DINAS  
PERPUSTAKAAN  
& ARSIP

DINAS  
KEPEMUDAAN  
& OLAH RAGA

Ekosistem  
pendidikan yg  
berkarakter

Pelayanan  
Budaya Baca

*Character  
Building  
Pemuda*

- **Indeks Pendidikan**
- Rata-rata Lama Sekolah
- Harapan Lama Sekolah
- APK
- APM
- % Guru yang tersertifikasi

- % peningkatan jumlah pengunjung
- % peningkatan koleksi yang terdigitalisasi
- % cakupan wilayah operasional perpustakaan keliling (57 kelurahan)

- % pemuda terlibat kasus NAPZA
- % kasus AIDS pada Pemuda
- Kota Layak Pemuda
- Presentase peningkatan jumlah medali emas yang diperoleh pada Porprov
- Presentase peningkatan jumlah medali emas yang diperoleh pada PON

Meningkatnya kualitas layanan kesehatan

Indikator :  
Indeks Kesehatan

DINAS  
KESEHATAN

DINAS  
KEPEMUDAAN &  
OLAHA RAGA

DP3AP2KB

Pemerataan Kualitas  
dan Aksesibilitas  
Pelayanan  
Kesehatan

Budaya  
Olahraga

Prevalensi  
Kontrasepsi

- **Indeks Kesehatan**
- Angka Harapan Hidup
- % Puskesmas terakreditasi
- % Puskesmas BLUD
- Cakupan penduduk yang terjamin asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat
- Angka Kematian Ibu
- Angka Kematian Bayi

- Penyelenggaraan event olahraga massal bertaraf internasional
- 1 bulan 1 event olahraga skala kota

- Angka pemakaian kontrasepsi bagi perempuan menikah usia 15 – 49
- Cakupan peserta KB Aktif

Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan non pangan

Indikator :  
Indeks Daya Beli/  
Purchasing Power Parity

DINAS PERTANIAN  
& KETAHANAN  
PANGAN

DINAS  
PERDAGANGAN

Ketahanan Pangan,  
produksi pangan

Stabilitas harga bahan  
pokok dan perlindungan  
konsumen

- **Pengeluaran per Kapita Pangan**
- Skor Pola Pangan Harapan utama
- Rasio konsumsi pangan lokal
- non beras terhadap beras
- Presentase peningkatan produksi sektor pertanian

- **Pengeluaran per Kapita**
- koefisien variasi harga bahan pokok antar waktu

# MISI 2

## Mewujudkan Kota Produktif dan Berdaya Saing berbasis Ekonomi Kreatif, Keberlanjutan dan Keterpaduan

Tujuan :  
Terwujudnya Produktivitas dan Daya Saing Daerah yang Merata dan Berkelanjutan

Indikator  
1. Pertumbuhan Ekonomi  
2. GINI Rasio

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif

Indikator :

% pertumbuhan ekonomi kreatif

Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Sarana prasarana Kota secara Terpadu

Indikator :

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)

Meningkatnya Kualitas kemanfaatan tata ruang dan Lingkungan Hidup

Indikator :

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)

DINAS PERINDUSTRIAN

DISBUDPAR

DINAS PERDAGANGAN

DINAS KOPERASI & UM

DISNAKER

DPMPTSP

Pertumbuhan IKM

kontribusi pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi kreatif

Pertumbuhan pasar rakyat

Pertumbuhan usaha mikro

Penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM

Meningkatnya kemitraan UKM dengan Usaha Besar

- % pertumbuhan Industri Kecil Menengah
- Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB
- Pertumbuhan jumlah unit usaha Industri Kecil
- pertumbuhan sentra IKM

- % pertumbuhan ekonomi kreatif
- Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB
- % Kunjungan Wisata
- pertumbuhan sentra ekonomi kreatif
- pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif

- Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB
- pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat
- Nilai ekspor bersih perdagangan

- % pertumbuhan usaha mikro
- % usaha mikro terhadap UKM
- % pertumbuhan unit usaha mikro yang naik menjadi usaha kecil
- % wirausaha baru yang tumbuh
- % koperasi sehat

- % tenaga kerja terserap di sektor UMKM
- Persentase pencari kerja yang ditempatkan

- Persentase Peningkatan Nilai Penanaman Modal dan Investasi Daerah

# MISI 2

## Mewujudkan Kota Produktif dan Berdaya Saing berbasis Ekonomi Kreatif, Keberlanjutan dan Keterpaduan

Tujuan :  
Terwujudnya Produktivitas dan Daya Saing Daerah yang Merata dan Berkelanjutan

- Indikator
1. Pertumbuhan Ekonomi
  2. GINI Rasio

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif

Indikator :

% pertumbuhan ekonomi kreatif

Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Sarana prasarana Kota secara Terpadu

Indikator :

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)

Meningkatnya Kualitas kemanfaatan tata ruang dan Lingkungan Hidup

Indikator :

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)

### DPUPR

pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan dukungan konektivitas bagi penguatan perekonomian daerah

- **Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Pekerjaan Umum**
- Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik
- Persentase jembatan kota dalam kondisi baik
- Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air
- Persentase rumah tinggal yang memiliki sarana / akses sanitasi layak
- Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat
- Persentase penurunan titik genangan air

### DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kualitas dan cakupan infrastruktur permukiman

- **Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Permukiman dan Perumahan**
- Persentase areal kawasan kumuh
- Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau
- Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU

### DINAS PERHUBUNGAN

infrastruktur penyediaan transportasi

- **Persentase layanan angkutan darat (jumlah angkutan darat/jumlah penumpang angkutan darat)**
- % penurunan titik kemacetan
- Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan
- % Pelayanan Angkutan Jalan (jaringan jalan yang terlayani angkutan umum/total jaringan jalan)
- Persentase kepemilikan KIR angkutan umum

### KECAMATAN

kualitas prasarana dan sarana publik di wilayah kecamatan

- **SKM pelayanan prasarana dan sarana publik di wilayah kecamatan**
- persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah kecamatan yang diakomodir
- persentase pelaksanaan peningkatan sarana prasarana kewilayahan (kegiatan sarpras kewilayahan dibanding dengan rencana kegiatan sarpras kewilayahan)

# MISI 2

## Mewujudkan Kota Produktif dan Berdaya Saing berbasis Ekonomi Kreatif, Keberlanjutan dan Keterpaduan

Tujuan :  
Terwujudnya Produktivitas dan Daya Saing Daerah yang Merata dan Berkelanjutan

- Indikator
1. Pertumbuhan Ekonomi
  2. GINI Rasio

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif

Indikator :

% pertumbuhan ekonomi kreatif

Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Sarana prasarana Kota secara Terpadu

Indikator :

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)

Meningkatnya Kualitas kemanfaatan tata ruang dan Lingkungan Hidup

Indikator :

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)

DLH

DPUPR

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kualitas Lingkungan Hidup

Kemanfaatan Tata Ruang

Kemanfaatan RTH Publik

- **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)**
- Indeks Kualitas Air
- Indeks Kualitas Udara
- persentase penurunan timbunan sampah yang dibuang ke TPA
- Persentase cakupan area pelayanan penanganan sampah
- Persentase jumlah sampah yang tertangani
- Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R

- **Ketaatan terhadap RTRW**
- Persentase dokumen tata ruang yang direviu/dilakukan pembaruan sesuai jadwal yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan

- Persentase Luasan RTH Publik yang Dikelola dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan
- Persentase penambahan luasan RTH Publik aktif
- Penambahan luasan lahan makam umum
- Survey kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan pemakaman umum

**MISI 3**  
Mewujudkan Kota yang Rukun dan Toleran berdasarkan keberagaman dan keberpihakan terhadap masyarakat rentan dan gender

**Tujuan :**  
Terwujudnya kesejahteraan dan kerukunan sosial yang berpihak masyarakat rentan dan gender

**Indikator**  
**Angka Kemiskinan**

**Meningkatnya Kualitas Perlindungan Sosial**  
**Indikator**  
**Persentase penurunan PMKS**

DINAS SOSIAL      DISNAKER      DP3AP2KB

kualitas perlindungan sosial      Hubungan Industrial      Kesejahteraan keluarga

- % penurunan PMKS
- % PMKS yang ditangani/dibina
- % PMKS binaan yang terentaskan/mandiri
- % PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar
- % penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial
- % penduduk miskin yang terdata by name by address, yang valid, reliabel dan mutakhir
- % konflik ketenagakerjaan dan hubungan industrial yang terselesaikan
- % tenaga kerja yang tercover atau mendapatkan jaminan keselamatan kerja (BPJS tenaga kerja)
- % ditanggung oleh pihak pemberi kerja
- % kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) aktif

**Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas**  
**Indikator**  
**Indeks Pembangunan Masy (IPMas);  
Indeks Pembangunan Gender (IPG)**

KECAMATAN      DP3AP2KB

Peran serta masyarakat      Pegasusutamaan gender

- **IPMas Kecamatan**
- % LPMK, BKM dan PKK kelurahan yang aktif
- **Indeks Pembangunan Gender (IPG)**
- % perangkat daerah yang menerapkan Anggaran Responsif Gender (ARG)

**Meningkatnya Stabilitas Lingkungan Sosial**  
**Indikator**  
**Indeks Modal Sosial**

BAKESBANGPOL      BPBD      SATPOL PP

Konduktivitas lingkungan sosial      Mitigasi dan responsivitas penanggulangan bencana      Perlindungan masyarakat

- Indeks Sikap Percaya dan Toleransi
- jumlah kejadian gangguan ketertiban/konflik sosial berlatar belakang SARA/pemilu
- partisipasi pemilih dalam Pilpres dan Pileg Tahun 2019
- **jumlah kelurahan tangguh bencana**
- rata-rata waktu respon kejadian bencana
- % korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat
- rasio linmas per RT
- tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

# MISI 4

Memastikan Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pemerintah Yang Tertib Hukum, Profesional Dan Akuntabel

Tujuan :

Terwujudnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel

Indikator :

**Indeks Reformasi Birokrasi**

Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Tertib Hukum

**Indikator :**

Persentase Peraturan Daerah yang ditegakkan

Meningkatnya Kualitas Sistem Kelembagaan yang Efektif

**Indikator :**

1. Opini BPK; 2. Rasio PAD;
3. Nilai SAKIP; 4. Maturitas SPIP

Meningkatnya Kualitas Meritokrasi Manajemen ASN

**Indikator :**

Indeks Profesionalitas ASN

Meningkatnya Integrasi Teknologi Informasi

**Indikator :**

Indeks kematangan SPBE

SATPOL PP

BAGIAN HUKUM

BKD

DISKOMINFO

DPMPTSP

Penegakan Perda

Penegakan Perda

Profesionalitas ASN

Kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Kematangan sistem pelayanan perizinan berbasis elektronik

- **Persentase Peraturan Daerah yang ditegakkan**
- Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)
- Persentase Penegakan PERDA

- **Persentase Peraturan Daerah yang ditegakkan**
- Persentase Penanganan Litigasi kepada Unsur-Unsur Pemerintah di Kota Malang yang diselesaikan di setiap Tingkat Peradilan
- Persentase Penanganan Penyelesaian Non Litigasi di Pemerintah Kota Malang
- Persentase advice permohonan bantuan hukum masyarakat miskin yang diteruskan ke OBH
- Prosentase Ranperda yang diterima DPRD
- Persentase Produk Hukum Daerah yang sesuai ketentuan perundang-undangan
- Jumlah Perda Kota Malang yang memuat ketentuan sanksi
- Nilai Komponen Penataan Peraturan Perundang-undangan pada Indeks RB

- **Indeks Profesionalitas ASN**
- Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
- Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural
- Persentase pemangku jabatan fungsional tertentu
- Persentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan
- Persentase PNS yang memperoleh nilai kinerja dibawah standar
- Persentase pelanggaran disiplin PNS yang telah ditindaklanjuti

- **Indeks Kematangan SPBE**
- Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan
- Cakupan Layanan Telekomunikasi
- Proporsi rumah tangga dengan akses internet
- Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi
- Persentase Sistem Informasi Manajemen yang terintegrasi

- **Indeks Kematangan SPBE**
- Persentase layanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi dalam SIM Pemerintah Kota Malang
- Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Perizinan dan Non Perizinan

# MISI 4

## Memastikan Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pemerintah Yang Tertib Hukum, Profesional Dan Akuntabel

Tujuan :  
Terwujudnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel

Indikator :  
**Indeks Reformasi Birokrasi**

Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Tertib Hukum

Indikator :

Persentase Peraturan Daerah yang ditegakkan

Meningkatnya Kualitas Sistem Kelembagaan yang Efektif

Indikator :

1. Opini BPK; 2. Rasio PAD; 3. Nilai SAKIP; 4. Maturitas SPIP

Meningkatnya Kualitas Meritokrasi Manajemen ASN

Indikator :

Indeks Profesionalitas ASN

Meningkatnya Integrasi Teknologi Informasi

Indikator :

Indeks kematangan SPBE

BPKAD

INSPEKTORAT

BARENLITBANG

BAGIAN ORGANISASI

BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH

DINAS PERPUSTAKAAN UMUM DAN ARSIP DAERAH

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

DINAS PERHUBUNGAN

DPMPTSP

SEKRETARIAT DPRD

Akuntabilitas pengelolaan dan penatausahaan keuangan

Pengawasan internal pemerintah

Akuntabilitas perencanaan pembangunan

Reformasi Birokrasi

Kemandirian Anggaran Daerah

Pelayanan berkualitas dan akuntabel

Pelayanan berkualitas dan akuntabel

Optimalisasi potensi sumber pendapatan daerah

Optimalisasi potensi sumber pendapatan daerah

Fasilitasi Fungsi DPRD

- Opini BPK
- Rasio PAD
- Kontribusi Pemanfaatan Aset terhadap PAD
- Persentase kesesuaian data rincian total BMD dengan aktif tetap Neraca Pemerintah Daerah
- Persentase BMD berupa Tanah yang telah bersertifikat
- Persentase SKPD yang tingkat penyerapan sesuai dengan alokasi anggaran per tahun
- Persentase SILPA terhadap APBD
- Persentase belanja pendidikan
- Persentase belanja kesehatan
- Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung

- Nilai SAKIP
- Maturitas SPIP
- Nilai Komponen Evaluasi Internal pada SAKIP
- Persentase tindak lanjut temuan
- Persentase Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti
- Persentase SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai A
- Persentase SKPD menyelenggarakan Standar Pelayanan sesuai dengan ketentuan
- Persentase SPIP Perangkat Daerah yang memadai
- Nilai Komponen Penguatan Pengawasan pada Indeks RB

- Nilai SAKIP
- Nilai Komponen perencanaan kinerja pada SAKIP
- Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD
- Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD
- Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW
- Persentase implementasi rencana kelitbang
- Persentase pemanfaatan hasil kelitbang
- Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah

- Nilai SAKIP
- Nilai Komponen pelaporan kinerja pada SAKIP
- Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap layanan dasar Pemerintah Kota Malang
- Nilai Komponen Penataan dan Penguatan Organisasi pada Indeks RB
- Nilai Komponen Penataan Tatalaksana pada Indeks RB

- Rasio PAD
- Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD
- Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Pajak Daerah
- Persentase penurunan piutang Pajak Daerah

- Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Perpustakaan Umum
- Persentase peningkatan pengunjung Perpustakaan Umum

- Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kependudukan dan Catatan Sipil
- Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk kelahiran
- Rasio bayi berakte nikah
- Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Cakupan penerbitan akta kelahiran

- Rasio PAD
- Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap layanan di bidang perhubungan
- Kontribusi retribusi pelayanan parkir terhadap PAD

- Rasio PAD
- Kontribusi Retribusi IMB terhadap PAD

- % Propemperda yang menjadi Perda
- % Ketepatan waktu persetujuan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan



PEMERINTAH KOTA MALANG  
**BARENLITBANG**  
BADAN PENELITIAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KOTA MALANG  
Jl. KEMERDEKAAN No. 100A Malang 65131 Telp. (0341) 821111



# TERIMA KASIH

